

## BAB V

### KESIMPULAN

Konflik perbatasan Sumbar-Jambi antara Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo tidak kunjung selesai selama puluhan tahun. Penyelesaian masalah dimulai pada tahun 1990 di Jakarta yang disepakati bahwa penetapan batas wilayah Sumbar-Jambi berpedoman kepada Peta Topografi Tahun 1933 buatan Pemerintah Hindia Belanda yang *dicopy* kembali pada tahun 1945.

Pada tahun-tahun berikutnya terdapat ketidakkonsistenan dari pihak Jambi yang berulang kali mengganti keputusan mengenai titik batas, seperti menyetujui batas daerah berdasarkan Peta Topografi Tahun 1933, kemudian meminta batas dimajukan 1 Km ke arah Sungai Rumbai, kembali lagi menyetujui Peta Topografi Tahun 1933, kemudian tidak setuju, sampai pada akhirnya penetapan batas diminta berdasarkan Tembo dan Ranji yang mereka miliki.

Pada beberapa pertemuan, perwakilan masing-masing daerah secara bergantian tidak menghadiri rapat yang mengakibatkan beberapa pertemuan diundur tanggal dan waktunya. Kedua daerah yang bersangkutan masing-masing tetap bertahan dengan data yang dimiliki. Pemerintah Sumatera Barat dan masyarakatnya tetap dengan pendirian berdasarkan Peta Topografi Tahun 1933 yang *dicopy* ulang tahun 1945, sedangkan Pemerintah Jambi dan masyarakatnya mengharapkan batas dikaji ulang menurut Tembo/Ranji yang mereka miliki serta kesepakatan tertulis tokoh adat kedua belah pihak.



Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Bungo kepada masyarakat di daerah perbatasan menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kesepakatan yang telah disepakati pada beberapa pertemuan. Akibatnya masyarakat sering menolak kesepakatan sehingga harus diadakan pertemuan kembali. Pada tahun 2005 terjadi pernghancuran tugu perbatasan yang dibangun berdasarkan Peta Topografi 1993 oleh masyarakat Bungo dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Bungo.

Akibat tidak kunjung selesainya masalah perbatasan, pada 15 Juni 2008 hampir terjadi bentrokan antara masyarakat Kecamatan Sungai Rumbai dengan masyarakat Kecamatan Jujuhan diakibatkan terjadi pemasangan baliho Bupati dan Wakil Bupati Bungo serta spanduk yang bertuliskan “Selamat Datang di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi” yang dipasang di simpang SMAN 1 Sungai Rumbai atau di depan lapangan bola kaki Sungai Rumbai yang berjarak ±1,5 Km dari patok batas sesuai dengan Peta Topografi 1933. Pemasangan baliho dan spanduk tersebut dilakukan oleh pihak Pemda Kabupaten Bungo (Asisten I, Kabag Pemerintahan, Camat Jujuhan dan Kepala Desa yang juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bungo) sebagai tindak lanjut pemasangan baliho Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya berlokasi di pemberhentian kendaraan pada Km 61,5 ke arah Padang yang menurut mereka wilayah tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Masyarakat Sungai Rumbai mengatakan bahwa tindakan itu merupakan pencaplokan wilayah. Masyarakat yang tidak terima langsung membongkar baliho dan spanduk yang dipasang oleh Pemda Kabupaten Bungo tersebut. Baliho Pemkab



Dharmasraya yang terletak tidak jauh dari lokasi, yaitu ±500 M arah Jakarta dibongkar juga oleh masyarakat Kabupaten Bungo. Akibatnya terjadi ketegangan antar masyarakat hingga nyaris terjadi bentrok massa. Atas koordinasi yang baik antara pihak kepolisian kedua daerah keributan tersebut dapat diatasi. Berselang beberapa jam dimana massa sudah membubarkan diri, sekitar pukul 15.00 WIB dilakukan pertemuan antara Pemda Dharmasraya (Camat, Kapolsek, Kabag Tapem, Kabag Humas, DPRD) dengan Pemda Bungo (Asisten I Kabag Pemerintahan, DPRD, Camat, Kapolsek) untuk mengantisipasi agar tidak terjadi saling serang antara masyarakat perbatasan dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bertindak anarkis dan sama-sama menahan diri.



Akibat kejadian tersebut pemerintah kedua provinsi menyerahkan penyelesaian batas kepada tingkat terendah yaitu kepada Wali Nagari Sungai Rumbai dan Rio Dusun Sirih Sekapur. Pada pertemuan 14 Oktober 2009 bertempat di Hotel Pusako Bukittinggi telah disepakati bahwa perempatan Tugu Selamat Datang/Selamat Jalan yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, untuk Provinsi Jambi ditempatkan di lokasi Bengkel Batu Elang, sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat ditempatkan di lokasi Tugu yang roboh. Untuk Batas Provinsi yang berada di wilayah Barat Jalan Lintas Sumatera, batasnya ditentukan dari Tembulun Tinggi Pangian menuju Tembulun Tinggi Panual Maili Kalubuk Panjang menuju Lubuk Sibodi, kemudian yang telah diolah oleh masyarakat Sumatera Barat kembali ke Sumatera Barat, sedangkan yang diolah oleh masyarakat Jambi kembali ke Jambi. Untuk wilayah Timur di Jalan Lintas Sumatera berpedoman pada Tembo dan Ranji.

Untuk penegasan batas wilayah di lapangan Menteri Dalam Negeri menetapkan PT. Rasicipta Consultama sebagai pelaksana teknis dengan kegiatan utamanya meliputi pelacakan batas dilapangan, pemasangan pilar batas dan pengukuran posisi pilar batas. Penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi telah ditetapkan secara pasti dan telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Bungo, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Jambi serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat. Dengan kesepakatan tersebut, Mendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 7 Agustus 2018 berdasarkan hasil pelacakan batas oleh PT. Rasicipta Consultama.



Pada peraturan tersebut terdapat kesalahan penarikan batas yang merugikan Kabupaten Dharmasraya, yaitu adanya sarana pendidikan dan wilayah DPT yang terdaftar di KPU Kabupaten Dharmasraya sehingga Bupati Dharmasraya meminta usulan perbaikan dalam penarikan garis batas pada segmen Sungai Rumbai pada Pilar PBU 02A menuju TK 04.

Masalah perbatasan antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi akhirnya selesai pada tanggal 4 Maret 2021 di Hotel Best Western Plus Kemayoran Jakarta Pusat. Penandatanganan kesepakatan batas tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Bungo H. Safrudin Dwi Aprianto dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Mursidi disaksikan Kepala Biro Pemerintah Setda Provinsi Jambi Rakhmad Hidayat. Dengan dilakukannya

penandatanganan tersebut, konflik perbatasan ini akhirnya dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak.

